

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

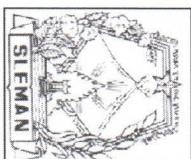
**KABUPATEN SLEMAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PELAYANAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) PEMANFAATAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN**

A. Identitas



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

Nomor SOP	470/08
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Drs. Susmiarto, M.M. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19660527 199303 1 003
Nama SOP	Pelayanan Perijinan Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Hak Akses Data Kependudukan

### Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
- 5 Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

### Kualifikasi pelaksana

1. pendidikan SMA, D3, S1, dan S2
2. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan khususnya prosedur pengajuan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan
3. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang prosedur kerja sama



6 Perda Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

**Keterkaitan**

Standar Operasional Prosedur ini terkait dengan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar;

**Peralatan/perengkapan**

1. Pedoman
2. alat tulis kantor;
3. perangkatkomputer;
4. sarana komunikasi;
5. jaringan internet

**Peringatan**

Apabila Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan menghambat pemanfaatan hak akses dan data kependudukan pada lembaga pengguna dan citra kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang baik.

**Pencatatan dan pendataan**

- Buku kendali surat
- Surat Pengantar
- Buku register perjanjian kerja sama
- Dokumen PKS

Solusi :

1. meningkatkan koordinasi internal
2. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM

B. BAGAN ALUR PELAYANAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) PEMANFAATAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

No	AKTIVITAS	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						Mutu Baku		Keterangan		
		Pengadmnistrasi rasi Umum	Analisis Kependudukan	Kepala Seksi Inovasi dan Kerja sama	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan		Waktu	Output
1	Menerima dan mengadministrasikan surat permohonan izin hak akses pemanfaatan data kependudukan dari lembaga calon pengguna								surat permohonan, lembar disposisi	3 mnt H1	tanda terima, register surat masuk, surat permohonan	
2	Mencermati dan mendisposisi surat permohonan untuk tindak lanjut bidang terkait								surat permohonan	4 mnt	disposisi, surat permohonan	
3	Mempelajari dan mengarahkan disposisi ke bidang terkait								disposisi, surat permohonan	3 mnt H2	disposisi, surat permohonan	
4	Mempelajari dan mendisposisi tindak lanjut surat permohonan kepada seksi terkait								disposisi, surat permohonan	4 mnt	disposisi, surat permohonan	
5	Mengkaji surat permohonan dan menyusun konsep PKS dengan berkoordinasi kepada pemohon dan Kepala Bidang								disposisi, surat permohonan	120 mnt	konsep perjanjian kerjasama	
6	Memeriksa, menganalisa dan mengoreksi konsep PKS								konsep perjanjian kerjasama	60 mnt H3	draft perjanjian kerjasama atau koreksi konsep perjanjian kerja sama	
7	Memeriksa dan mengoreksi konsep perjanjian PKS								konsep perjanjian kerjasama	60 mnt H4	draft perjanjian kerjasama atau koreksi konsep perjanjian kerja sama	
8	Menyapkan draft PKS yang telah disetujui sebagai bahan koordinasi dengan lembaga calon pengguna								draft perjanjian kerjasama atau koreksi konsep perjanjian kerja sama	45 mnt H5	draft perjanjian kerjasama yang disetujui	
9	Menyusun konsep surat permohonan izin hak akses pemanfaatan data kependudukan ke Kemendagri								draft surat permohonan atau revisi surat permohonan yang disetujui	60 mnt H5	konsep surat permohonan	
10	Memeriksa dan mengoreksi konsep surat permohonan izin hak akses ke Kemendagri								konsep surat permohonan ke Kemendagri	30 mnt	draft surat permohonan atau revisi surat permohonan	
11	Mencermati dan mengoreksi konsep surat permohonan izin hak akses pemanfaatan data kependudukan								draft surat permohonan atau revisi surat permohonan	30 mnt H6	surat permohonan yang dlandalangi	
12	Menyapkan berkas permohonan ke Kemendagri berupa surat permohonan yang dilampiri draft PKS								surat permohonan yang dlandalangi	45 mnt H7	berkas permohonan	
13	Mengarahkan proses administrasi surat permohonan untuk dikirim ke Kemendagri								berkas permohonan	30 mnt H7	register surat keluar	
14	Menunggu surat balasan permohonan izin hak akses pemanfaatan data kependudukan dari kemendagri								surat masuk, lembar disposisi	3 mnt H21	register surat masuk, surat	
15	Menerima dan mengadministrasikan surat balasan dari kemendagri								surat	4 mnt	surat, disposisi	
16	Mencermati dan mendisposisi surat untuk tindak lanjut bidang terkait								surat, disposisi	3 mnt H22	surat, disposisi	
17	Mempelajari dan mengarahkan disposisi ke bidang terkait								surat, disposisi	4 mnt	surat, disposisi	
18	Mempelajari dan mendisposisi tindak lanjut surat permohonan kepada seksi terkait								surat, disposisi	120 mnt	konsep PKS	
19	Mengkaji surat dan menyusun konsep PKS dengan berkoordinasi kepada Kepala Bidang								konsep PKS	60 mnt	konsep PKS atau revisi konsep PKS	
20	Memeriksa, menganalisa dan mengoreksi konsep PKS dan surat balasan mendagri								konsep PKS atau revisi konsep PKS	60 mnt H23	draft PKS yang disetujui	
21	Memeriksa dan mengoreksi konsep perjanjian PKS								konsep PKS atau revisi konsep PKS	60 mnt H23	draft PKS yang disetujui	

